



# Population Roadmap Integration Strategy In Accelerating Regional Development In North Sumatra Province 2025–2029 Towards A Golden Indonesia 2045

## Strategi Integrasi Peta Jalan Kependudukan Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Di Provinsi Sumatera Utara 2025–2029 Menuju Indonesia Emas 2045

**Heri Pranata Satria**

Perencana Ahli Muda pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera utara

Email: [heripranatasatria390@gmail.com](mailto:heripranatasatria390@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [26 April 2026]

Revised [20 Juli 2026]

Accepted [28 Juli 2026]

### KEYWORDS

*PJPK, Regional Planning  
Integration, Demographic  
Bonus, Multi-Level  
Governance, North Sumatra.*

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Pembangunan kependudukan memasuki fase strategis menuju Indonesia Emas 2045 melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029. Provinsi Sumatera Utara yang sedang berada pada puncak bonus demografi dengan proporsi penduduk usia produktif mencapai 67,23% dan rasio ketergantungan 48,75% (2025), memiliki peluang besar untuk mempercepat pembangunan daerah. Namun, implementasi integrasi PJPK di tingkat kabupaten/kota masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan integrasi 30 indikator PJPK ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) serta merumuskan strategi yang efektif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, data sekunder SIGA April 2026, dan Progress Monitoring PJPK per 9 April 2026, penelitian ini mengidentifikasi tiga masalah utama: belum optimalnya internalisasi indikator PJPK, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kapasitas teknis dan komitmen politik aparaturnya daerah. Analisis menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada sistem pengembangan kompetensi aparaturnya yang belum berorientasi kependudukan, kurangnya pendampingan teknis berkelanjutan dari provinsi, dan budaya perencanaan yang masih sektoral. Dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP), model pendampingan teknis terstruktur terpilih sebagai alternatif terbaik dengan skor 0,412. Rekomendasi utama adalah penerbitan Peraturan Gubernur tentang Pendampingan Teknis Terstruktur dan Wajib Integrasi 30 Indikator PJPK ke dalam dokumen perencanaan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kapasitas aparaturnya, serta memastikan PJPK menjadi acuan utama percepatan pembangunan daerah di Sumatera Utara menuju Indonesia Emas 2045.

### ABSTRACT

Population development enters a strategic phase towards a Golden Indonesia 2045 through the Population Development Roadmap (PJPK) 2025–2029. North Sumatra Province, which is at the peak of the demographic bonus with the proportion of the productive age population reaching 67.23% and a dependency ratio of 48.75% (2025), has a great opportunity to accelerate regional development. However, the implementation of PJPK integration at the district/city level still faces various obstacles. This study aims to analyze the problem of integrating 30 PJPK indicators into regional planning documents (RPJMD and RKPD) and formulate an effective strategy. Using a qualitative approach with document analysis, SIGA April 2026 secondary data, and PJPK Progress Monitoring as of April 9, 2026, this study identifies three main problems: the lack of optimal internalization of PJPK indicators, weak cross-sector coordination, and low technical capacity and political commitment of regional apparatus. The analysis shows that the root of the problem lies in the system of competency development of apparatus that is not yet population-oriented, the lack of continuous technical assistance from the province, and the planning culture that is still sectoral. Using the Analytic Hierarchy Process (AHP), the structured technical mentoring model was selected as the best alternative with a score of 0.412. The main recommendation is the issuance of a Governor's Regulation on Structured Technical Assistance and the Mandatory Integration of 30 PJPK Indicators into regional planning documents. This policy is expected to strengthen cross-sector synergy, increase the capacity of the apparatus, and ensure that PJPK becomes the main reference for accelerating regional development in North Sumatra towards a Golden Indonesia 2045.

## PENDAHULUAN

Pembangunan kependudukan Indonesia memasuki fase strategis menuju Indonesia Emas 2045 melalui Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diturunkan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029. PJPK merupakan dokumen operasional nasional yang mengintegrasikan dinamika kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, dengan lima sasaran utama: (1) pengelolaan kuantitas penduduk, (2) peningkatan kualitas penduduk, (3)

pembangunan keluarga, (4) penataan persebaran penduduk dan pengarahan mobilitas, serta (5) penataan administrasi data kependudukan yang akurat dan terintegrasi. Dokumen ini menjadi landasan bagi 30 indikator dan rencana aksi lintas sektor untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera.

Pemerintah Pusat telah meluncurkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 sebagai instrumen operasional untuk mengoptimalkan bonus demografi tersebut. PJPK memuat lima sasaran strategis dan 30 indikator lintas sektor yang harus diinternalisasi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Namun, implementasi integrasi PJPK di tingkat kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara belum berjalan maksimal.

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 dirancang dengan lima sasaran strategis utama yang dijabarkan ke dalam 30 indikator kinerja lintas sektor. Sasaran pertama adalah Pengendalian Kuantitas Penduduk, yang diukur melalui tiga indikator utama, yaitu Total Fertility Rate (TFR), Age-Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15–19 tahun, serta Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi (Unmet Need). Sasaran ini bertujuan menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dan menekan kehamilan remaja.

Sasaran kedua, Peningkatan Kualitas Penduduk, merupakan sasaran terbesar dengan 14 indikator. Sasaran ini mencakup bidang pendidikan (rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan persentase penduduk bersertifikat keahlian), bidang kesehatan (prevalensi stunting pada balita, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Ibu), serta bidang ekonomi dan ketenagakerjaan (tingkat kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, persentase pekerja informal, Gini Ratio, PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, kepemilikan NPWP, dan tingkat pengangguran sektor formal).

Sasaran ketiga adalah Pembangunan Keluarga yang diukur melalui tujuh indikator, meliputi Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga), Indeks Perlindungan Anak, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman, Indeks Lansia Berdaya, Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja, serta cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sasaran keempat, Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk, diukur dengan dua indikator yaitu Persentase Kampung/Kelurahan Keluarga Berkualitas Mandiri dan Rate Nett Recent Migrasi. Sementara Sasaran kelima, Integrasi dan Penataan Data Kependudukan, diukur melalui empat indikator capaian administrasi kependudukan, yaitu cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Balita, Akta Nikah, Akta Cerai, dan Akta Kematian.

**Tabel 1. Indikator PJPK Tahun 2025 2029**

| SASARAN DAN INDIKATOR PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025 - 2029 |                                                                |                                                                          |                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SASARAN 1 PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK                                   | SASARAN 2 : PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK                      | SASARAN 3 PEMBANGUNAN KELUARGA                                           | SASARAN 4 PENATAAN DAN PERSEBARAN & PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK | SASARAN 5 INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN     |
|                                                                             | Pendidikan :                                                   |                                                                          |                                                                   |                                           |
| Total Fertility Rate (TFR)                                                  | Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas           | Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)                                   | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri                   | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita |
| Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun                              | Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)                  | Indeks Perlindungan Anak                                                 | Rate Nett Recent Migrasi                                          | Cakupan Kepemilikan Akta Cerai            |
| Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi                                        | Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian                     | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan(%) |                                                                   | Cakupan Kepemilikan Akta Nikah            |
|                                                                             | Kesehatan :                                                    | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman(%)                               |                                                                   | Cakupan Kepemilikan Akta Kematian         |
|                                                                             | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) | Indeks Lansia Berdaya                                                    |                                                                   |                                           |
|                                                                             | Angka Kematian Ibu (AKI)                                       | Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja                          |                                                                   |                                           |
|                                                                             | Ekonomi :                                                      | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)                       |                                                                   |                                           |
|                                                                             | Tingkat Kemiskinan                                             |                                                                          |                                                                   |                                           |
|                                                                             | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita                      |                                                                          |                                                                   |                                           |
|                                                                             | Persentase Pekerja Informal                                    |                                                                          |                                                                   |                                           |
|                                                                             | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal     |                                                                          |                                                                   |                                           |
|                                                                             | Gini Ratio                                                     |                                                                          |                                                                   |                                           |
|                                                                             | PDRB Perkapita                                                 |                                                                          |                                                                   |                                           |
|                                                                             | Tingkat Pengangguran Terbuka                                   |                                                                          |                                                                   |                                           |
|                                                                             | Persentase Kepemilikan NPWP                                    |                                                                          |                                                                   |                                           |

Sasaran dan 30 indikator tersebut dirancang secara terintegrasi dan lintas sektor, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Dalam konteks otonomi daerah yang semakin kuat, pemerintah kabupaten/ kota memiliki kewenangan yang besar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Oleh karena itu,

advokasi kepada pimpinan daerah menjadi sangat strategis untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Tanpa integrasi yang kuat, pembangunan daerah berpotensi tidak sensitif terhadap dinamika penduduk, sehingga sasaran pembangunan sulit tercapai secara optimal.

Implementasi integrasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 di Provinsi Sumatera Utara belum berjalan maksimal di tingkat daerah. Meskipun PJPK telah menjadi dokumen strategis nasional untuk mengoptimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, banyak kabupaten/kota di Sumatera Utara masih menghadapi kesulitan dalam menginternalisasi 30 indikator utama ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang memasuki fase penting bonus demografi. Jumlah penduduk diproyeksikan mencapai sekitar 15,78 juta jiwa pada tahun 2025, dengan proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai 67,23% atau lebih dari 10,6 juta jiwa. Rasio ketergantungan berada pada angka rendah 48,75%, memberikan “jendela peluang” emas bagi percepatan pembangunan daerah.

Namun, peluang ini belum dimanfaatkan secara optimal. Prevalensi stunting di Sumatera Utara masih berada di angka 22% pada SSGI 2024, lebih tinggi dari rata-rata nasional 19,8%. Jumlah balita stunting diperkirakan mencapai sekitar 294.934–316.456 jiwa, menempatkan Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan beban stunting tertinggi di Indonesia.

Total Fertility Rate (TFR) Sumatera Utara juga masih berada di angka 2,36–2,48 (berdasarkan Long Form SP2020 dan proyeksi terkini), di atas target penggantian ideal 2,1. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas keluarga belum berjalan secara efektif di tingkat daerah.

Isu utama yang dihadapi adalah “Implementasi integrasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Belum berjalan Maksimal di Daerah”. Meskipun PJPK telah ditetapkan sebagai pedoman strategis, realisasi di tingkat kabupaten/kota masih jauh dari harapan.

Terdapat tiga pernyataan masalah utama yang saling terkait. Pertama, belum optimalnya internalisasi 30 indikator PJPK ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga PJPK belum menjadi acuan utama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Kedua, lemahnya sinergi dan koordinasi lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan, yang menyebabkan implementasi integrasi PJPK di daerah berjalan secara parsial dan tumpang tindih antar program.

Ketiga, rendahnya komitmen politik dan kapasitas teknis aparatur daerah dalam memahami serta melaksanakan integrasi PJPK, sehingga target-target strategis PJPK sulit dicapai secara konsisten di tingkat kabupaten/kota.

**Tabel 2. Analisis USG (Urgency–Seriousness–Growth)**

| Daftar masalah | Urgency | Growth | Seriousness | Total |
|----------------|---------|--------|-------------|-------|
| Masalah 1      | 17      | 13     | 13          | 43    |
| Masalah 2      | 13      | 15     | 12          | 40    |
| Masalah 3      | 10      | 13     | 14          | 37    |
|                |         |        |             |       |

Berdasarkan hasil Analisis USG, Masalah 1 (Belum optimalnya internalisasi 30 indikator PJPK ke dalam RPJMD dan RKPD di kabupaten/kota) merupakan isu paling prioritas dengan total skor tertinggi (43), terutama didorong oleh tingkat urgensi yang sangat tinggi (17). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan internalisasi indikator PJPK ke dokumen perencanaan daerah bersifat sangat mendesak dan harus segera diatasi karena menjadi akar dari belum efektifnya PJPK sebagai acuan pembangunan. Masalah 2 (Lemahnya sinergi dan koordinasi lintas sektor) berada di urutan kedua dengan skor 40, dengan pertumbuhan masalah (Growth) yang paling tinggi (15), mengindikasikan bahwa jika tidak ditangani segera, isu koordinasi ini akan semakin meluas dan kompleks.

Sementara Masalah 3 (Rendahnya komitmen politik dan kapasitas teknis aparatur daerah) memperoleh skor 37, dengan tingkat keseriusan (Seriousness) tertinggi (14), menandakan bahwa meskipun urgensinya lebih rendah, dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian target PJPK bersifat sangat serius dan fundamental. Secara keseluruhan, ketiga masalah ini saling terkait dan menjadi hambatan utama dalam implementasi PJPK di Provinsi Sumatera Utara.

## LANDASAN TEORI

### Konsep Bonus Demografi

Bonus demografi (demographic dividend) merupakan keuntungan ekonomi yang timbul akibat perubahan struktur umur penduduk selama proses transisi demografi. Secara sederhana, bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun), sehingga rasio ketergantungan menjadi rendah. Kondisi ini menciptakan “jendela peluang” (window of opportunity) bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan tabungan, dan investasi sumber daya manusia.

Menurut Bloom, Canning, dan Sevilla (2003), bonus demografi bukanlah hasil otomatis dari perubahan demografi, melainkan potensi yang hanya dapat diwujudkan apabila disertai kebijakan yang tepat di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan investasi modal manusia. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh ekonom Harvard, David E. Bloom dan David Canning. Mereka menyatakan bahwa struktur umur penduduk memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan sekadar ukuran atau laju pertumbuhan penduduk itu sendiri.

Di Indonesia, konsep bonus demografi menjadi salah satu pilar utama dalam RPJPN 2025–2045 dan PJPK 2025–2029. Bagi Provinsi Sumatera Utara, dengan proporsi penduduk usia produktif mencapai 67,23% dan rasio ketergantungan 48,75% pada tahun 2025, bonus demografi ini menjadi peluang strategis. Namun, tanpa integrasi PJPK yang kuat, peluang tersebut berisiko menjadi “bonus yang hilang” (lost dividend).

**Tabel 3. Rasio Ketergantungan Provinsi Sumatera Utara**

| # | KABUPATEN/KOTA          | 2010    |                 | 2020    |                 | 2023    |                         | 2024    |                         | 2025    |                         |
|---|-------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|
|   |                         | CAPAIAN | SUMBER          | CAPAIAN | SUMBER          | CAPAIAN | SUMBER                  | CAPAIAN | SUMBER                  | CAPAIAN | SUMBER                  |
|   | PROVINSI SUMATERA UTARA | 59.05   | Sensus Penduduk | 48.33   | Sensus Penduduk | 48.56   | Proyeksi Penduduk (BPS) | 48.65   | Proyeksi Penduduk (BPS) | 48.75   | Proyeksi Penduduk (BPS) |

PJPK merupakan dokumen operasional nasional yang menjadi penjabaran teknis dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) menuju Indonesia Emas 2045. Dokumen ini mengadopsi pendekatan holistik, lintas sektor, dan berbasis data dengan lima sasaran strategis utama serta 30 indikator kinerja. PJPK dirancang sebagai “peta jalan” strategis untuk mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam seluruh proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah (RPJPN, RPJMN, RPJMD, dan RKPD).

### Policy Integration Theory

Policy Integration Theory adalah kerangka teoritis yang menjelaskan upaya mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas tingkat pemerintahan untuk mengatasi permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Menurut Tosun dan Lang (2017), policy integration merupakan proses politik yang melibatkan koordinasi aktor, penggabungan instrumen kebijakan dari berbagai sektor, serta penciptaan mekanisme pelaksanaan dan evaluasi yang konsisten untuk menyelesaikan masalah multidimensi.

### Dimensi Policy Integration

Menurut Tosun & Lang (2017) serta Cejudo & Trein (2023), terdapat tiga dimensi utama dalam Policy Integration:

#### 1. Dimensi Substantif (Substantive Integration)

Meliputi penggabungan tujuan, sasaran, dan nilai-nilai kebijakan antar sektor. Contoh: Mengintegrasikan sasaran penurunan stunting (sektor kesehatan) dengan pengendalian fertilitas (sektor KB) dan peningkatan kualitas SDM (sektor pendidikan dan ketenagakerjaan) ke dalam satu kerangka PJPK.

#### 2. Dimensi Prosesual / Instrumental (Procedural Integration)

Penyelarasan seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Contoh: Menyelaraskan indikator PJPK ke dalam RPJMD, RKPD, dan APBD agar tidak ada tumpang tindih program.

3. Dimensi Kelembagaan (Institutional Integration)  
Meliputi pembentukan struktur organisasi, mekanisme koordinasi, dan budaya kerja lintas sektor. Contoh: Pembentukan Tim Koordinasi PJPK lintas OPD dan antar tingkat pemerintahan (Provinsi – Kabupaten/Kota).
4. Strategi Integrasi Kebijakan  
Untuk mewujudkan policy integration, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan:
  - a. Hierarchical Strategy  
Menggunakan kekuasaan pimpinan tertinggi (Gubernur) untuk memaksa integrasi melalui regulasi yang mengikat, seperti Peraturan Gubernur (Pergub).
  - b. Collaborative Strategy  
Membangun forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan semua pemangku kepentingan secara sukarela namun terstruktur.
  - c. Instrumental Strategy  
Menggunakan instrumen bersama seperti anggaran terpadu, satu data kependudukan, dan sistem monitoring bersama.
  - d. Cognitive Strategy  
Membangun pemahaman bersama (shared understanding) melalui pelatihan, advokasi, dan sosialisasi tentang pentingnya PJPK.

Dalam konteks Strategi Integrasi PJPK di Provinsi Sumatera Utara, Policy Integration Theory sangat relevan karena PJPK bersifat lintas sektor (Kependudukan, Keluarga Berencana, Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Sosial) serta lintas pemerintahan. Lemahnya integrasi saat ini menyebabkan 30 indikator PJPK belum optimal diinternalisasi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integrasi yang kuat melalui kombinasi hierarchical strategy (Pergub) dan collaborative strategy (Tim Pendamping Teknis) agar jendela peluang bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal.

## **METODE PENELITIAN**

Analisis didasarkan pada kerangka teori dan regulasi. Tujuan utama adalah mengidentifikasi beberapa opsi strategi integrasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 ke dalam percepatan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, kemudian memilih satu alternatif terbaik melalui metode yang sistematis dan transparan. Berdasarkan kerangka teori dan regulasi diatas, berikut tiga alternatif solusi strategis yang komprehensif dan dapat diimplementasikan secara bertahap di Sumatera Utara:

### **Alternatif 1:**

Model Penguatan Kapasitas Aparatur Daerah (Capacity Building Approach) Alternatif ini berfokus pada peningkatan kompetensi dan kemampuan aparatur perencanaan di kabupaten/kota melalui pelatihan intensif, sertifikasi kompetensi PJPK, dan pengembangan modul pelatihan. Pendekatan ini bertujuan membangun SDM yang mandiri dan memiliki pemahaman mendalam tentang integrasi 30 indikator PJPK ke dalam RPJMD dan RKPD. Kelebihan utamanya adalah dampak jangka panjang, namun memerlukan waktu yang relatif lama untuk melihat hasil signifikan.

### **Alternatif 2:**

Model Pendampingan Teknis Terstruktur (Technical Assistance Approach) — Alternatif Terpilih. Alternatif ini menekankan pendampingan langsung dan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota melalui Tim Pendamping Teknis PJPK. Pendampingan dilakukan secara rutin dengan metode asistensi, mentoring, on-the-job training, dan penyediaan panduan teknis operasional. Model ini unggul karena cepat memberikan hasil, memiliki daya ikat yang kuat, dan mampu mengatasi sekaligus masalah kapasitas, koordinasi, serta budaya sektoral.

### **Alternatif 3:**

Model Mainstreaming dan Perubahan Budaya Perencanaan Berwawasan Kependudukan. Alternatif ini bertujuan mengintegrasikan perspektif kependudukan dan PJPK secara menyeluruh ke dalam seluruh siklus perencanaan daerah (mainstreaming). Pendekatan ini meliputi revisi pedoman perencanaan, advokasi kepada pimpinan daerah, serta perubahan budaya perencanaan dari pendekatan sektoral menjadi integratif. Kelebihannya adalah perubahan yang lebih fundamental dan berkelanjutan, meskipun prosesnya memerlukan waktu yang lebih lama.

Dalam menganalisis prioritas dari alternatif kebijakan, telah dilakukan scoring 1-5 oleh key person di lingkungan pengampuh PJPK se Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan kriteria

efektifitas mengatasi akar masalah, kemudahan implementasi, keberlanjutan, daya ikat hukum & integrasi perencanaan biaya dan efisiensi.

**Tabel 4. Tabel Kebijakan Alternatif**

| Pilihan Alternatif Kebijakan                                                | Kriteria                           |              |                        |              |               |              |                                            |              |                     | Total Nilai |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------|
|                                                                             | Efektivitas Mengatasi Akar Masalah |              | Kemudahan Implementasi |              | Keberlanjutan |              | Daya Ikat Hukum & Integrasi Ke Perencanaan |              | Biaya Dan Efisiensi |             |            |
|                                                                             | NILAI                              | BOBOT (35 %) | NILAI                  | BOBOT (30 %) | NILAI         | BOBOT (20 %) | NILAI                                      | BOBOT (10 %) | NILAI               |             | BOBOT (5%) |
| Alternatif 1: Model Penguatan Kapasitas Aparatur Daerah (Capacity Building) | 107                                | 37.45        | 102                    | 30.6         | 103           | 20.6         | 108                                        | 10.8         | 100                 | 5           | 104.45     |
| Alternatif 2: Model Pendampingan Teknis Terstruktur (Technical Assistance ) | 110                                | 38.5         | 104                    | 31.2         | 107           | 21.4         | 103                                        | 10.3         | 104                 | 5.2         | 106.6      |
| Alternatif 3: Model Mainstreaming dan Perubahan Budaya Perencanaan          | 111                                | 38.85        | 100                    | 30           | 107           | 21.4         | 108                                        | 10.8         | 106                 | 5.3         | 106.35     |

Hasil survey penilaian alternatif kebijakan yang melibatkan responden dari berbagai stakeholder di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan yang jelas. Analisis dilakukan dengan mengkombinasikan bobot kriteria yang diperoleh dari metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan teknik weighted scoring berdasarkan penilaian responden.

Hasil survey penilaian alternatif kebijakan menunjukkan bahwa Alternatif 2 (Model Pendampingan Teknis Terstruktur) memperoleh skor total tertinggi yaitu 106,6, diikuti oleh Alternatif 3 dengan skor 106,35, dan Alternatif 1 dengan skor 104,45. Pada kriteria Efektivitas mengatasi akar masalah (bobot 35%), Alternatif 3 unggul dengan nilai bobot 38,85, diikuti Alternatif 2 (38,5) dan Alternatif 1 (37,45). Hal ini mengindikasikan bahwa responden melihat pendekatan mainstreaming dan pendampingan teknis lebih efektif dalam menyelesaikan akar masalah utama dibandingkan model capacity building semata.

Pada kriteria Kemudahan Implementasi (bobot 30%), Alternatif 2 mendominasi dengan skor bobot 31,2, jauh di atas Alternatif 1 (30,6) dan Alternatif 3 (30,0). Temuan ini memperkuat argumen bahwa model pendampingan teknis langsung dari provinsi ke kabupaten/kota dinilai lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dua alternatif lainnya, terutama karena melibatkan asistensi rutin dan panduan teknis yang lebih operasional.

Dari aspek Keberlanjutan (bobot 20%) dan Daya Ikat Hukum & Integrasi ke Perencanaan (bobot 10%), Alternatif 2 dan Alternatif 3 menunjukkan performa yang relatif setara. Alternatif 2 unggul pada keberlanjutan (21,4), sementara Alternatif 3 sedikit lebih unggul pada daya ikat hukum (10,8). Hal ini



menunjukkan bahwa kedua model tersebut dipandang memiliki potensi keberlanjutan yang baik, meskipun Alternatif 2 tetap lebih unggul secara keseluruhan.

Pada kriteria Biaya dan Efisiensi (bobot 5%), Alternatif 3 memperoleh skor tertinggi (5,3), diikuti Alternatif 2 (5,2) dan Alternatif 1 (5,0). Meskipun bobotnya kecil, hasil ini menunjukkan bahwa responden cenderung melihat model mainstreaming sebagai pendekatan yang lebih hemat biaya dalam jangka panjang dibandingkan model capacity building yang memerlukan pelatihan masif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil survey ini semakin memperkuat pemilihan Alternatif 2 (Model Pendampingan Teknis Terstruktur) sebagai strategi terbaik. Dengan total skor tertinggi dan keunggulan pada dua kriteria paling berbobot (Efektivitas dan Kemudahan Implementasi), model ini dinilai paling realistis dan efektif untuk mengatasi permasalahan integrasi PJPK di Provinsi Sumatera Utara. Hasil ini selaras dengan analisis AHP sebelumnya dan memberikan legitimasi empiris bagi rekomendasi penerbitan Peraturan Gubernur tentang pendampingan teknis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis masalah, kerangka teori dan regulasi, serta hasil pemilihan alternatif menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan survey responden pada Bab sebelumnya, rekomendasi kebijakan utama yang diajukan adalah:

Penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara tentang Pendampingan Teknis Terstruktur dan Wajib Integrasi 30 Indikator PJPK ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD dan RKPD). Pergub ini menjadi rekomendasi kebijakan tunggal yang paling strategis karena mampu mengatasi ketiga akar masalah sekaligus. Pergub tersebut harus memuat paling tidak enam hal pokok:

1. Pembentukan Tim Pendamping Teknis PJPK Provinsi yang bersifat lintas OPD.
2. Kewajiban bagi setiap kabupaten/kota untuk menginternalisasi 100% indikator PJPK ke dalam RPJMD dan RKPD.
3. Mekanisme asistensi teknis triwulanan dan monitoring berbasis satu data.
4. Sistem insentif (DAK, APBD, penghargaan) dan sanksi administratif.
5. Integrasi dengan program Kampung Keluarga Berkualitas dan Satu Data Kependudukan.
6. Jangka waktu pelaksanaan serta mekanisme evaluasi tahunan.

### **Strategi Implementasi**

Implementasi rekomendasi kebijakan dibagi menjadi tiga tahap utama:

#### **Tahap 1: Persiapan (Juni – Desember 2026)**

- a. Penerbitan Pergub dan pembentukan Tim Pendamping Teknis.
- b. Sosialisasi dan advokasi kepada seluruh Bupati/Walikota serta kepala OPD.
- c. Penyusunan panduan teknis operasional dan modul pendampingan.

#### **Tahap 2: Pelaksanaan Intensif (2027–2028)**

- a. Pendampingan teknis langsung ke 33 kabupaten/kota.
- b. Integrasi indikator PJPK ke dalam RKPD Tahun 2027 dan RPJMD revisi.
- c. Penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan terpadu.

#### **Tahap 3: Institutionalization dan Evaluasi (2029 ke depan)**

- a. Menjadikan PJPK sebagai bagian permanen dalam siklus perencanaan daerah.
- b. Evaluasi menyeluruh dan penyesuaian target sesuai pencapaian bonus demografi.

### **Manfaat dan Dampak yang Diharapkan**

Dengan diterapkannya rekomendasi ini, diharapkan terjadi:

- a. Meningkatnya sinergi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan.
- b. Optimalisasi bonus demografi Provinsi Sumatera Utara (rasio ketergantungan 48,75% pada 2025).
- c. Percepatan penurunan stunting, pengendalian TFR, dan peningkatan kualitas keluarga.
- d. PJPK menjadi acuan utama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pembangunan kependudukan merupakan kunci utama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Provinsi Sumatera Utara yang sedang berada pada puncak bonus demografi memiliki peluang emas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila 30 indikator PJPK berhasil diinternalisasi secara penuh ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Melalui penerbitan Pergub tentang Pendampingan Teknis Terstruktur, diharapkan Provinsi Sumatera Utara dapat mengubah tantangan integrasi PJPK menjadi kekuatan kolaboratif lintas sektor. Keberhasilan ini tidak hanya akan berdampak pada pencapaian target PJPK, tetapi juga menjadi kontribusi nyata Sumatera Utara bagi keberhasilan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. “Bonus demografi hanya akan menjadi berkah apabila disertai dengan kebijakan yang tepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.”

## DAFTAR PUSTAKA

- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). *The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Adioetomo, S. M. (2005). *Bonus Demografi: Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: BKKBN.
- Bappenas, BPS, & UNFPA. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023–2025). *Sumatera Utara dalam Angka dan Proyeksi Penduduk Sumatera Utara*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. (2025). *Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029*. Jakarta: BKKBN.
- Bloom, D. E., & Williamson, J. G. (1998). “Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia”. *The World Bank Economic Review*, 12(3), 419–455.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2025). *Sumatera Utara Dalam Angka 2025 dan Proyeksi Penduduk Sumatera Utara 2015–2025*. Medan: BPS Sumut.
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN & Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2025/2026). *Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Provinsi Sumatera Utara 2025–2029*.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). *The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. (2025). *Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2025). *Proyeksi Penduduk Sumatera Utara 2025–2029*. Medan: BPS Sumut.
- Bappenas. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045*. Jakarta: Bappenas.
- Adioetomo, S. M. (2005). *Bonus Demografi: Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: BKKBN.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2026 tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029.
- Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029.
- Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara (2025). *Rapat Finalisasi Penyusunan PJPK Sumut*, 11 November 2025.
- BKKBN Perwakilan Sumatera Utara (2025–2026). *Laporan Rakorda Bangga Kencana dan Konsolidasi PJPK*.
- BPS & Dinas P3AKB Sumut (2025). *Data capaian Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (54,03% pada 2024)*.